

Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Permukiman Kumuh Di Kota Padang (Studi Kasus : Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh)

¹Fitria Yulia, ²Bambang Istijono, ³Benny Hidayat
^{1,2,3}Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Korespondensi : fitriayliaaa@gmail.com

Abstrak

Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam 15 provinsi dengan luas permukiman kumuh tertinggi di Indonesia. Kota Padang, sebagai kota terbesar serta ibukota provinsi memiliki jumlah kawasan permukiman kumuh dengan luas 122,33 ha. Dari 22 Kelurahan di Padang, salah satu daerah permukiman kumuhnya terluas terdapat di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Program KOTAKU kemudian hadir mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif. Dalam dua tahun, program KOTAKU menginisiasi kegiatan CFW (Cash For Work) dan Bantuan Sanitasi dengan total anggaran hampir satu miliar dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat di sana. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif dan faktor penghambat Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan metode pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan metode pengukuran efektivitas program menggunakan Pentagonal Aset 7 Indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Binuang Kampung Dalam berfokus pada perbaikan jalan dengan volume 2.352,4 meter, perbaikan drainase dengan volume 275,7 meter, peningkatan kapasitas masyarakat 1 paket, dan bantuan perbaikan sanitasi kepada 100 KK. Akan tetapi program KOTAKU tetap dianggap kurang efektif, karena tidak membawa perubahan pada tiga indikator lainnya. Adapun faktor penghambat keefektivitasan program ialah ketiadaan program pada indikator keteraturan bangunan, persampahan serta proteksi kebakaran dan faktor lambatnya pencairan dana.

Kata kunci: Efektivitas, Program KOTAKU, Permukiman Kumuh

Abstract

West Sumatera Province is one of the 15 provinces with the highest slum area in Indonesia. The city of Padang, as the largest city and the provincial capital, has a number of slum areas with an area of 122.33 ha. Of the 22 Kelurahan in Padang, one of the widest slum areas is in the Kelurahan Binuang Kampung Dalam. The KOTAKU program is then present to direct and synergize all forms of collaboration between parties to prevent and improve the quality of slum settlements, especially the community as active development subjects. Within two years, the KOTAKU program initiated CFW (Cash For Work) and Sanitation Assistance activities with a total budget of nearly one billion by involving the full participation of the people there. This thesis aims to analyze how effective and the inhibiting factors of the KOTAKU Program are in dealing with slum settlements in Binuang Kampung Dalam Village. This study used a descriptive qualitative approach, and the method of selecting informants used a purposive sampling technique with the method of measuring program effectiveness using the Pentagonal Assets 7 Indicators. The results showed that the implementation of the KOTAKU program in Binuang Kampung Dalam Kelurahan focused on road repairs with a volume of 2,352.4 meters, drainage improvements with a volume of 275.7 meters, community capacity building 1 package, and sanitation improvement assistance to 100 families. However, the KOTAKU program is still considered less effective, because it does not bring changes to the other three indicators. The factors inhibiting the effectiveness of the program are the absence of programs on the indicators of building order, waste management and fire protection and the slow disbursement of funds.

Keyword: Effectiveness, KOTAKU Program, Slum Settlement

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Peraturan Pemerintah, 2016). Terdapat beberapa upaya pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, salah satunya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, 2016 merupakan salah satu upaya nyata dalam penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi, yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di Indonesia (<http://kotaku.pu.go.id>). Berdasarkan SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Padang (2019) menginformasikan bahwa “Total permukiman dengan kategori kumuh di kota Padang terdiri dari 22 Kelurahan dengan Total Luas Permukiman Kumuh Kota Padang adalah 122,33 ha, dan Kelurahan Binuang Kampung Dalam sendiri memiliki total area yang berkriteria kumuh seluas 11,3 ha”.

Berdasarkan SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Padang (2019) menginformasikan bahwa “Total permukiman dengan kategori kumuh di kota Padang terdiri dari 22 Kelurahan dengan Total Luas Permukiman Kumuh Kota Padang adalah 122,33 ha, dan Kelurahan Binuang Kampung Dalam sendiri memiliki total area yang berkriteria kumuh seluas 11,3 ha”. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Binuang Kampung Dalam merupakan salah satu kelurahan dengan area *slum* terbesar di Kota Padang. Jadi, dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya tersebut diharapkan dapat mengurangi luas permukiman kumuh yang ada di Kota Padang terutama Kelurahan Binuang Kampung Dalam.

Menurut laporan RPLP KOTAKU (2022) “Berdasarkan hasil penggambaran Pentagonal Aset 7 Indikator Kekumuhan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, yaitu Keteraturan Bangunan, Jalan Lingkungan, Drainase, Air Minum, Sanitasi, Persampahan, dan Kebakaran, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Binuang Kampung Dalam memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam upaya pemberantasan permukiman kumuh”. Dari berbagai indikator tersebut, terdapat dua program yang diimplementasikan oleh tim KOTAKU di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, yaitu CFW (*Cash For Work*) dan Bantuan Sanitasi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis seberapa Efektif Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam (2) untuk menganalisis apa saja faktor penghambat Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan serta perbuatan manusia, bukan dengan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014).

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan (Effendi, 1989). Selain itu, analisis data juga dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan peneliti untuk menyederhanakan data untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran, kesimpulan sementara untuk dijadikan dasar untuk pengumpulan data berikutnya dan kesimpulan akhir dari penelitian (Huberman, 1992).

Terdapat tiga tahapan untuk melakukan pengolahan data kualitatif :

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*), peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi (Agus Salim, 2006:22-23).

Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan. Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah itu dikumpulkan dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh kemudian baru dianalisa dan peneliti harus mulai menganalisisnya selama proses penelitian berlangsung (Afrizal, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Program KOTAKU Dalam Menangani Permukiman Kumuh

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program lanjutan dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Program KOTAKU telah disosialisasikan ditingkat nasional pada tanggal 27 April 2016. Kelurahan Binuang Kampung Dalam sebagai salah satu lokasi kumuh di Kota Padang telah melaksanakan implementasi program KOTAKU, mulai tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua program utama dari KOTAKU per periode 2021 dan periode 2022 yang diimplementasikan di kelurahan tersebut. Masing-masing adalah program CFW (2021) dan program bantuan sanitasi (2022). Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan kedua program tersebut, akan dijelaskan dalam sub bab di bawah ini :

1. Cash For Work (CFW)

Program CFW ini mulai diimplementasikan pada tanggal 13 Maret 2021, dimana pelaksanaannya dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19 yang lalu yang dilaksanakan di 13 titik di 4 RW. Berdasarkan Surat Direktur PKP tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya No. PR.01.02.CK/30 tanggal 24 Februari 2021, maka dalam program ini terdapat tiga kegiatan utama yaitu :

- a) Perbaikan jalan dengan volume 2.352,4 meter.
- b) Perbaikan drainase dengan volume 275,7 meter
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat 1 paket (LPJ CFW KOTAKU 2021).

Sebelum terlaksananya kegiatan, terdapat beberapa pertimbangan dan kriteria yang membuat Tim KOTAKU mengimplementasikan program ini di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Helendra, Koordinator KOTAKU Padang, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Pelaksanaan program CFW ini tentu ada landasan dan pertimbangannya. Pertama, program ini memang diselenggarakan atas instruksi Kementerian yang diteruskan ke Dinas PUPR Provinsi, hingga pelaksanaannya adalah dinas-dinas kota. Salah satu alasan lahirnya program ini ialah karena potensi penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Jadi dalam hal pekerjaan teknisnya, kita melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Tetapi partisipasi mereka itu sifatnya bukan gotong royong, melainkan kita libatkan secara profesional. Artinya, pekerjaan mereka kita bayar. Mulai dari mandor sampai pekerja tukanganya, semua mendapat upah. Hal ini memang dimaksudkan karena pada masa pelaksanaan program kan

memang disaat suasana pandemi Covid. Dimana sebagian masyarakat kita tidak dapat bekerja karena adanya aturan PPKM dulu itu. Seperti yang kita tahu, banyak sektor-sektor pekerjaan masyarakat yang sama sekali tidak bergerak selama periode pandemi. Maka dengan kehadiran program ini, selain masyarakat dapat terlibat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana mereka, masyarakat itu pun dapat penghasilan dari penyelenggaraan program. Terus yang kedua, di Kelurahan Binuang Kampung Dalam itu juga banyak terdapat jalan-jalan yang memiliki tingkat kerusakan sedang dan ringan. Hal yang sama juga kita temukan pada kondisi drainase warga. Sehingga adanya program CFW ini bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan dan drainase yang memang sudah seharusnya dilakukan rutin dan berkala. Dengan adanya program CFW ini, tentu kita berharap semua infrastruktur tersebut masih dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sana.”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa program CFW diinisiasi oleh Kementerian PUPR untuk dilaksanakan di daerah-daerah tertentu, termasuk Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Tujuan program ini untuk melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase di kelurahan tersebut yang memang banyak terdapat kerusakan. Selain itu, program ini juga memiliki misi ekonomi, dimana pekerjaan-pekerjaan perbaikan tersebut melibatkan partisipasi penuh masyarakat setempat. Semua pekerjaan yang dilakukan, para masyarakat yang terlibat juga mendapat upah sesuai standar yang ditentukan. Misi membantu perekonomian masyarakat ini, khususnya bagi yang terlibat bekerja, merupakan salah satu tujuan program ini untuk menggairahkan perekonomian masyarakat yang tengah sulit di masa pandemi yang lalu.

2. Program Bantuan Infrastruktur Sanitasi

Program Bantuan Sanitasi merupakan Pembangunan Tangki Septik skala individual yang pembiayaannya berasal dari DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkim Padang pada Program Kawasan Permukiman Pekerjaan Pembangunan 100 Tangki Septik tahun anggaran 2022. Bantuan tersebut dibagikan kepada 100 KK yang dinilai memiliki sanitasi yang kurang layak, dengan total biaya sebesar Rp.525.000.000. Pekerjaan program ini mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan waktu penyelesaiannya selama 200 hari.

Sejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi ini khususnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan sarana sanitasi masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

erdasarkan data RPLP KOTAKU 2022, ditemui sebanyak 39,13 % rumah tangga yang tidak memiliki jamban sesuai standar teknis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Okta Nofi (38 tahun), Koordinator KOTAKU, sebagai berikut :

“Dalam rancangan program kita di Binuang Kampung Dalam, salah satu yang mendapat perhatian adalah buruknya kualitas sanitasi air limbah di sana. Bahkan dari data survey fasilitator kami, lebih dari separuh rumah tangga di sana tergolong tidak memiliki fasilitas MCK dan tangki septik yang memadai. Secara persentase, minimnya sarana sanitasi yang sesuai standar teknis di sana menjadi salah satu yang paling rendah di Kota Padang. Salah satu penyebabnya ialah karena adanya aliran sungai yang membentang di daerah tersebut, sehingga membuat masyarakat sudah terbiasa mengalirkan limbah mereka ke sungai. Makanya di tahun 2022 itu, program bantuan dan perbaikan kualitas sanitasi menjadi prioritas KOTAKU di kelurahan tersebut.”

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa kualitas sanitasi air limbah di Kelurahan Binuang Kampung Dalam dikategorikan cukup buruk. Atas dasar itu pula yang membuat program prioritas KOTAKU periode 2022 di kelurahan tersebut berupa bantuan perbaikan sanitasi bagi masyarakat setempat. Program ini juga berfokus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana MCK dan sanitasi yang layak.

3. Pengukuran Efektivitas Program KOTAKU Dalam Menangani Permukiman Kumuh

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui terdapat dua program utama KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Kedua program yang telah diimplementasikan tersebut adalah CFW (2021) dan Bantuan Sanitasi (2022). Maka pada bab ini, peneliti akan mengidentifikasi sejauh apa efektivitas kedua program tersebut dalam pengentasan permukiman kumuh.

Sebagai alat ukurnya, maka seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, menggunakan metode Pentagonal Aset 7 Indikator. Metode ini peneliti pilih karena alat ukur ini pula lah yang digunakan tim KOTAKU dalam menganalisa tingkat kekumuhan pada suatu permukiman di perkotaan (RPLP KOTAKU 2022). Selain itu, metode tersebut juga berlandaskan pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Untuk lebih mempertajam pengukuran, peneliti juga menambahkan penyajian data berupa wawancara mendalam dengan masyarakat Kelurahan Binuang Kampung Dalam yang merupakan subjek dan penerima manfaat program.

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas program harus berdasarkan pada kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Selaras dengan teori mengenai efektivitas menurut Siagian (2002) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa kegiatan yang dijalankannya:”. Maka dari itu, efektivitas menunjukkan sebuah keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran maka tinggi pula efektivitasnya.

Faktor Penghambat Program KOTAKU Dalam Menangani Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Untuk itu, pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai faktor penghambat program KOTAKU pada saat implemementasi penanganan permasalahan permukiman kumuh tersebut diantaranya :

1. Belum Adanya Program Yang Menangani Permasalahan Indikator Keteraturan Bangunan, Persampahan dan Proteksi Kebakaran

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa indikator yang belum tertangani dalam permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Indikator tersebut adalah keteraturan bangunan, persampahan dan proteksi kebakaran. Padahal dalam upaya meminimalisir permukiman kumuh, ketiga indikator tersebut tidak kalah pentingnya dengan indikator-indikator lain. Akan tetapi dalam dua tahun pelaksanaan program KOTAKU di sana, tidak terdapat satu pun kegiatan yang bertujuan menyelesaikan problema ketiga indikator tersebut.

Secara garis besar, landasan pelaksanaan program KOTAKU berdasarkan pendataan. Lembaga masyarakat di desa atau kelurahan seperti Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) bersama tim fasilitator KOTAKU terlebih dahulu melakukan pendataan dan survey lapangan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh yang terdiri dari keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran di daerahnya masing-masing. Data tersebut diintergrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk

menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru (Pedoman Umum Program Kotaku, 2016).

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa setiap kegiatan yang dicanangkan berasal dari pendataan awal yang dilakukan dengan menggunakan metode Pentagonal Aset 7 Indikator. Hasil dari pendataan tersebut lah yang akan menentukan kegiatan yang akan dijadikan program prioritas dan dilaksanakan baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota. Dengan kata lain, belum adanya program yang menangani ketiga indikator di atas, lebih dipandang sebagai variabel yang belum menjadi prioritas untuk ditangani. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Helendra, sebagai berikut :

“Seharusnya memang dibutuhkan program tersendiri. Cuma memang program seperti itu tidak ada dalam dua tahun terakhir kami di KOTAKU. Padahal laporan survey kami sudah sampai ke dinas. Ada baiknya juga memang kalau dari laporan tim kami itu ditindaklanjuti. Tapi juga yang kita ketahui, ada skala prioritas penanganan indikator yang dianggap bisa diimplementasikan di setiap daerah. Apalagi sekarang program KOTAKU sudah tidak ada lagi. Resminya berakhir tanggal 30 Juni 2023 ini, dan anggarannya juga sudah habis. Makanya kami berharap dengan adanya laporan survey dan pendataan dari tim fasilitator yang lalu itu, ada kebijakan-kebijakan lain yang dapat mengentaskan semua masalah pada indikator-indikator tersebut setuntas-tuntasnya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim KOTAKU yang pernah melaksanakan program di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, mengakui keberadaan program mereka di sana belum dapat menyelesaikan segala persoalan permukiman kumuh sekalipun secara data mereka menyatakan ketiga indikator tersebut butuh perbaikan. Ketidakmampuan mereka ini lebih disebabkan karena adanya skala prioritas program pada setiap tahunnya yang bisa dikerjakan. Apalagi semenjak pertengahan tahun ini, program KOTAKU skala nasional serentak dihentikan, sehingga permasalahan mendasar dalam meminimalisir permukiman kumuh dianggap belum tuntas.

2. Faktor Lambatnya Pencairan Dana

Pencairan anggaran dalam suatu program sudah semestinya melalui SOP tertentu. Hal ini sudah menjadi kewajiban, karena setiap program membutuhkan kepastian perkembangannya yang selaras dengan tahapan dana anggaran yang dicairkan. Ada laporan dan pertanggungjawaban yang melekat pada penggunaan dana anggaran, sehingga prosedur untuk menurunkan uang anggaran harus berdasarkan aturan-aturan tertentu.

Namun tidak jarang pula ditemui adanya faktor lain yang berimbas pada lambatnya turun anggaran program. Seperti misalnya faktor kesalahan administrasi dan birokrasi pada instansi tertentu. Pada pelaksanaan program bantuan sanitasi, hal seperti itu lah yang sempat terjadi. Lambatnya proses pencairan dana membuat pengerjaan program sempat mengalami *addendum* dari target awal 150 hari menjadi 200 hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Akma Tampan, sebagai berikut :

“Memang program bantuan sanitasi di Kelurahan Binuang Kampung Dalam sempat memperoleh *addendum*. Salah satu faktornya karena pencairan dana yang tak kunjung turun. Hingga akhirnya dengan adanya *addendum* itu, target penyelesaian pekerjaan diperpanjang selama 50 hari.”

Secara prosedur, program bantuan sanitasi memiliki aturan tahapan pencairan dana. Tahapan tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Perkim Padang sebagai *stakeholder* dan *pilot project* program tersebut. Dana infrastruktur adalah anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Sanitasi berupa uang *cash* dan dimasukkan ke Rekening KSM dengan tahapan antara lain sebagai berikut (RKM Dinas Perkim, 2022) :

- a) Tahap I dapat dicairkan sebesar 25% apabila dokumen RKM dan kontrak kerja sama dilaksanakan.

- b) Tahap II dapat dicairkan sebesar 45% apabila progres fisik mencapai minimal 20% disertai minimal 20% disertai dengan LPD (Laporan Penggunaan Dana) Tahap I.
- c) Tahap III dapat dicairkan sebesar 30% apabila progres fisik telah mencapai Tahap II. PPK dengan KSM wajib melakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali *addendum* dan atau amandemen kontrak, dilakukan sebelum Tahap III. Ini wajib dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi lapangan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan volume (panjang pipa, jumlah sambungan rumah, dll).

Selanjutnya mengenai prosedur dan proses pencairan dana juga mempunyai mekanisme. Prosedur dan proses pencairan dana diatur dalam PMK 130.07/2019 dengan proses pencairan dana ke rekening KSM dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I dapat dicairkan sebesar 25% apabila :
 - I. Dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat) telah di verifikasi.
 - II. Kontrak Kerja Sama sudah dilaksanakan.
 - III. Rencana Penggunaan Dana Tahap I.
- b. Tahap II dapat dicairkan sebesar 45% apabila :
 - I. Progress fisik mencapai minimal 25% disertai dengan LPD Tahap I.
 - II. Rencana Penggunaan Dana Tahap II.
- c. Tahap III dapat dicairkan sebesar 35% apabila :
 - I. Progress fisik telah mencapai minimal 60% disertai dengan LPD Tahap II.
 - II. Rencana Penggunaan Dana Tahap III.

Bila dilihat pada pembagian tahapan di atas, maka jelas secara aturan tertulis segala prosedur dan proses pencairan dana anggaran telah ditetapkan. Akan tetapi kenyataannya, timbul masalah-masalah yang menjadi penghambat sehingga dana anggaran tersebut mengalami penundaan pencairan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Vivi Handayani sebagai berikut :

“Salah satu yang membuat program ini sempat terkendala adalah terlambatnya pencairan dana. Di awal program saja, sudah terjadi penundaan pencairan dana Termin I dikarenakan berbenturan dengan libur Hari Raya Idul Fitri waktu itu. Lalu pencairan dana Termin II dan III juga lambat. Alasannya katanya lama di proses administrasi kantor karena harus antri. Hingga untuk penyelesaian, kami melakukan pendampingan ke kantor Dinas Perkim untuk melakukan pengajuan Termin-nya.”

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prosedural pencairan dana bisa *slow process* akibat berbagai faktor. Seperti terbenturnya jadwal pencairan dana dengan hari libur lebaran. Lalu kemudian, proses administrasi dan birokrasi di instansi yang lambat akibat antrian juga turut menjadi faktor-faktor di luar prediksi sehingga menjadi kendala penyelenggaraan program dapat diselesaikan sesuai dengan agenda dan target awalnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai faktor penghambat pada pelaksanaan program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Matriks Faktor Penghambat Program

No.	Faktor	Keterangan
1.	Belum Adanya Program Yang Menangani Permasalahan Indikator Keteraturan Bangunan,	“Tidak adanya program soal ini mungkin karena anggaran yang dibutuhkan cukup banyak. Tentu itu butuh perencanaan yang matang juga dari pemerintah.” (Nova Novelia, Fasilitator Sosial KOTAKU). Hanya saja memang sejauh ini, belum ada terdengar upaya untuk menangani permasalahan persampahan di Binuang itu. Padahal laporan survey kami sudah sampai ke dinas. Ada baiknya

Persampahan dan Proteksi Kebakaran	<p>juga memang kalau dari laporan tim kami itu ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, karena indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah, khususnya di permukiman kumuh.” (Helendra. Koordinator KOTAKU). “Sayangnya memang, indikator ini juga belum dapat kami perbaiki dengan program KOTAKU. Tapi setidaknya, dari laporan tim fasilitator kami bisa menjadi pijakan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat agar fasilitas proteksi kebakaran diberbagai daerah dapat ditingkatkan. Apalagi karena ini berhubungan dengan nyawa banyak orang.” (Okta Nofi. Koordinator KOTAKU).</p> <p>“Mungkin karena pendeknya jangka waktu pelaksanaan program KOTAKU ini, makanya tidak semua permasalahan di sana berhasil kami tangani.” (Vivi Handayani, Fasilitator Teknik KOTAKU)</p>
2. Lambatnya Pencairan Dana	<p>“Salah satu yang membuat program ini sempat terkendala adalah terlambatnya pencairan dana. Di awal program saja, sudah terjadi penundaan pencairan dana Termin I dikarenakan berbenturan dengan libur Hari Raya Idul Fitri waktu itu. Lalu pencairan dana Termin II dan III juga lambat. Alasannya katanya lama di proses administrasi kantor karena harus antri. Hingga untuk penyelesaian, kami melakukan pendampingan ke kantor Dinas Perkim untuk melakukan pengajuan Termin-nya.” (Vivi Handayani, Fasilitator Teknik KOTAKU).</p> <p>“Yang paling berdampak itu karena pencairan dana kegiatan sering terlambat, sehingga pengerjaan juga mundur dari target kerja yang disusun di awal. Makanya pengerjaan bantuan sanitasi itu sempat mundur hampir dua bulan dari target kerja. Ya mau bagaimana, dana pengerjaannya yang telat turun.” (Okta Nofi. Koordinator KOTAKU).</p>

4. KESIMPULAN

Melalui pengukuran menggunakan metode Pentagonal Aset 7 Indikator dan wawancara dengan masyarakat, terdapat tiga indikator yang menjadi prioritas program KOTAKU di Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Ketiga indikator tersebut adalah jalan lingkungan, drainase dan sanitasi. Sementara terdapat tiga indikator lain yang tidak tersentuh program yaitu keteraturan bangunan, persampahan dan proteksi kebakaran. Sedangkan satu indikator lainnya, yaitu air minum, tidak dianggap sebagai permasalahan bagi kelurahan tersebut, dikarenakan kondisi air minum yang memang dikategorikan bersih

dan layak dari awal sebelum dilaksanakannya program. Atas dasar itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam berjalan kurang efektif karena penanganannya hanya pada sebagian indikator kumuh saja, sementara tidak membawa perubahan pada sebagian indikator lainnya.

Walaupun indikator Keteraturan Bangunan, Persampahan, dan Proteksi Kebakaran tidak termasuk bagian dari program, namun tetap peneliti jadikan sebagai acuan penilaian. Dikarenakan dari Perangkat Kelurahan sudah melakukan pengajuan mengenai tambahan program penanganan permasalahan dari 3 indikator tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang untuk diteruskan kepada Kementerian PUPR, namun hingga saat ini masih menunggu realisasinya. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwasanya Program Kotaku masih belum efektif dalam pelaksanaannya di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, karena belum semua indikator terselesaikan permasalahannya.

Seperti umumnya pada implementasi program lainnya, program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang Kampung Dalam juga menghadapi berbagai kendala. Terdapat beberapa faktor penghambat program KOTAKU pada saat implemementasi penanganan permasalahan permukiman kumuh diantaranya faktor belum adanya program yang menangani permasalahan indikator keteraturan bangunan, persampahan dan proteksi kebakaran, serta faktor lambatnya pencairan dana pada pelaksanaan program.

5. SARAN

- a. Tetap konsisten dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut penanganan permukiman kumuh. Dibutuhkan evaluasi dan pengawasan yang baik agar setiap kebijakan dan program-program yang dihasilkan tepat sasaran dan maksimal dalam mencapai tujuannya pada seluruh indikator yang ditetapkan.
- b. Memperbaiki prosedur administrasi dan birokrasi pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu program yang menyangkut persoalan hidup masyarakat. Lambatnya penanganan di instansi seperti salah satunya pencairan dana, akan berdampak pula pada terhalangnya pelaksanaan suatu program dengan lancar dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiasasmita. 2010. Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi. Jakarta. Graha Ilmu. 202 hal.
- [2] Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta. Rajawali Pers.
- [3] Agus, S. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- [4] Aisyahwati, V.F. 2018. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. 115 hal.
- [5] Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 413 hal.
- [6] Auliannisa, Dywangga. 2009. Permukiman Kumuh di Kota Bandung. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Indonesia. 54 hal.
- [7] Bintarto, R. 1997. Pengantar Geografi Kota. Yogyakarta. Spring. 88 hal.
- [8] Bolay, J.C. 1997. "Sustainable Development, Urbanization and Environmental Risks: The Priority of Local Actions in Ho Chi Minh City, Vietnam" in Journal of Urban Technology, Volume 6, Number 2 : 65.
- [9] Bungin, B. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Bumi Aksara.

- [10] Creswell, J.W. 2010. Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta. PT. Pustaka Pelajar.
- [11] Daldjoeni, N. 1991. Dasar-Dasar Geografi Politik. Bandung. Citra Aditya Bakti. 102 hal.
- [12] Danim, S. 2004. Motivasi, Kepemimpinan, dan Efektivitas Kelompok. Jakarta. PT Refika Aditama. 161 hal.
- [13] Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2024.
- [14] Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University. 420 hal.
- [15] Dwi, A., & Antariksa. 2005. Studi Karakteristik Pola Permukiman di Kecamatan Labang, Madura. Jurnal ASPI 4(2). 93 hal.
- [16] Fitriyaningsih, I.N. 2018. Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). [Skripsi]. Semarang. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Walisongo. 82 hal.